



Keironisan Diskursif dalam Pidato Presiden Prabowo: Sebuah Tinjauan Ekstensif melalui Pendekatan Wacana Ruth Wodak

Adlina Farah Amalia^{1*}, Undang Sudana²

^{1,2}Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

Email: ¹adlinafarahamalia@upi.edu

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena diskursif dalam pidato Presiden Prabowo Subianto pada peresmian Museum Marsinah di Nganjuk di tengah krisis makroekonomi akibat pelemahan nilai tukar rupiah. Penelitian ini bertujuan untuk membongkar makna laten, kontradiksi internal, dan strategi kebahasaan yang digunakan presiden dalam mengonstruksi dikotomi antara elit dan rakyat serta dalam mengelola gejolak publik kelas pekerja. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif berlandaskan paradigma kritis dengan menerapkan kerangka Analisis Wacana Kritis (CDA) model Discourse-Historical Approach (DHA) yang dikembangkan oleh Ruth Wodak. Data primer berupa dokumen transkrip verbatim pidato kepresidenan pada 16 Mei 2026 yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan simak-catat. Analisis data dilakukan secara abduktif melalui dekonstruksi teks menggunakan lima instrumen strategi diskursif Wodak dan dievaluasi dengan pisau kritik tiga dimensi (imanen, sosio-diagnostik, dan prospektif). Hasil penelitian menunjukkan adanya paradoks diskursif dan kontradiksi internal dalam struktur wacana presiden. Melalui strategi nominasi dan predikasi, dibangun oposisi biner yang memosisikan presiden di luar lingkaran kekuasaan (sebagai pelindung rakyat) sekaligus mempraktikkan strategi delegitimasi tanggung jawab (*blame avoidance*) dengan mengalihkan kesalahan sistemik kepada aparat bawah. Melalui strategi argumentasi, dieksploitasi *topos of history*, *topos of threat*, dan *topos of benevolence* untuk merasionalisasi kegagalan ekonomi domestik sebagai imbas murni tekanan internasional. Terakhir, strategi mitigasi ekstrem berupa klaim retorik “rakyat desa enggak pakai dolar” diidentifikasi sebagai bentuk disinformasi diskursif yang menegaskan dampak nyata krisis di sektor riil demi melanggengkan penundukan kelas marginal dan menjaga hegemoni pemerintah yang absolut.

Kata Kunci: Ironi Diskursif, Politik, Wacana Kritis.

Abstract

*This research is motivated by the President Prabowo Subianto's speech at the inauguration of the Marsinah Museum in Nganjuk, delivered amid a macroeconomic crisis marked by the extreme depreciation of the rupiah exchange rate. This study aims to dismantle the latent meanings, internal contradictions, and linguistic strategies used by the president to construct a dichotomy between the elite and the people, as well as to manage the unrest among the working-class public. The method employed is a descriptive qualitative approach grounded in the critical paradigm, applying the Critical Discourse Analysis (CDA) framework through the Discourse-Historical Approach (DHA) developed by Ruth Wodak. The primary data consists of the verbatim transcript of the presidential speech on May 16th, 2026, collected through documentation and note-taking techniques. The findings reveal an acute irony and fatal self-contradiction within the president's discourse structure. Through nomination and predication strategies, a binary opposition is constructed, positioning the president outside the power circle (as a protector of the poor) while simultaneously practicing institutional blame avoidance by shifting systemic failures onto lower apparatuses. Through argumentation strategies, the *topos of history*, *topos of threat*, and *topos of benevolence* are exploited to rationalize domestic economic failures as purely the impact of international pressure. Lastly, the extreme mitigation strategy in the rhetorical claim that “rural people do not use*

dollars” is identified as a form of discursive disinformation that negates the real impact of the crisis on the real sector to perpetuate the subordination of marginal classes and maintain absolute government hegemony.

Keywords: *Discursive Irony, Politics, Critical Discourse.*

PENDAHULUAN

Bahasa dalam ranah politik dan institusional bersinggungan sangat erat dengan kekuasaan, bahasa berfungsi sebagai medium bagi kekuatan sosial dan dominasi yang penggunaannya sering kali menutupi ideologi tertentu (Habermas, 1977 dalam Wodak, 2001). Wacana politik jarang sekali bersifat netral; ia merupakan arena di mana identitas dibentuk, perbedaan ditegaskan, dan relasi kekuasaan direproduksi secara diskursif (Wodak, 2001). Salah satu fenomena diskursif yang belakangan ini menyita perhatian dalam lanskap politik Indonesia adalah pidato Presiden Prabowo Subianto yang merespons isu melonjaknya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Dalam pidato tersebut, Presiden Prabowo berupaya meredam kepanikan publik dengan meyakinkan bahwa sektor pangan dan energi aman, serta melontarkan pernyataan retorik, “rakyat desa nggak pakai dolar kok”. Lebih jauh, pidato ini tidak hanya membahas persoalan ekonomi, tetapi secara tajam mengonstruksi polarisasi sosial antara “rakyat” yang secara inheren diposisikan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan “unsur pimpinan” yang dilabeli secara negatif karena dianggap hanya berteriak setia namun prakteknya tidak berpihak kepada bangsa dan rakyatnya sendiri.

Kajian analisis wacana terhadap pidato kepresidenan di Indonesia menjadi topik yang menarik dalam beberapa tahun terakhir. Susanto (2021) mengkaji retorika politik dalam konteks pemilihan presiden Indonesia menggunakan pendekatan CDA dan mengungkap bagaimana narasi kepemimpinan dikonstruksi untuk membangun legitimasi elektoral. Dalam jalur yang sama, Wibowo (2019) menelaah representasi ideologi dalam teks pidato kenegaraan Indonesia dan menunjukkan bahwa bahasa kepresidenan berfungsi sebagai instrumen normalisasi kebijakan sekaligus pengelolaan persepsi publik. Lebih spesifik, Naufal, Nurhadi, dan Anshori (2021) menggunakan kerangka DHA Ruth Wodak untuk menganalisis wacana media di lingkungan Tempo dan membuktikan bahwa strategi nominasi serta prediksi secara konsisten beroperasi dalam teks-teks berbahasa Indonesia untuk mereproduksi polarisasi sosial.

Meskipun demikian, sejumlah ruang substansial masih terdapat dari literatur yang ada. Pertama, sebagian besar kajian terdahulu lebih menyandarkan diri pada model CDA Fairclough atau Van Dijk, sementara penerapan DHA Wodak secara penuh—yang meliputi kelima strategi diskursif beserta kritik tiga dimensinya—terhadap wacana kepresidenan Indonesia masih sangat terbatas (Naufal et al., 2021; Hasmianti et al., 2025). Kedua, dan yang paling krusial, belum ada kajian yang secara spesifik menganalisis pidato kepresidenan Indonesia dalam konteks krisis makroekonomi akut. Terlebih khusus depresiasi ekstrem nilai tukar rupiah yang terjadi pada pertengahan tahun 2026 yang bersamaan dengan tekanan geopolitik global berinteraksi secara langsung dengan strategi wacana domestik. Kesenjangan inilah yang menjadi titik masuk utama riset ini yaitu, mengintegrasikan kerangka DHA Wodak secara komprehensif untuk membongkar strategi kebahasaan Presiden Prabowo Subianto dalam merespons krisis kurs dolar-rupiah, sebuah fenomena diskursif yang belum pernah dikaji secara sistematis dalam tradisi analisis wacana kritis di Indonesia.

Untuk membedah bagaimana relasi kekuasaan, ideologi, dan identitas ini direpresentasikan, Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis/CDA) menawarkan kerangka metodologis yang tepat. CDA secara fundamental berfokus pada analisis teks—baik lisan maupun tulisan—untuk menyelidiki secara kritis ketidaksetaraan sosial, diskriminasi, dan kontrol sebagaimana ia dimanifestasikan melalui penggunaan bahasa (Wodak, 2001). Secara spesifik, Pendekatan Wacana-Historis (Discourse-Historical Approach/DHA) yang dikembangkan oleh Ruth Wodak sangat relevan digunakan dalam konteks ini, mengingat pendekatan ini menaruh perhatian besar pada wacana politik yang melibatkan strategi representasi diri secara positif (positive self-presentation) dan representasi “liyan” secara negatif (negative other-presentation) untuk membedakan antara kelompok “Kita” (in-groups) dan “Mereka” (out-groups).

Menurut Wodak (2010), konstruksi diskursif diskriminatif atau yang bersifat mempolarisasi semacam itu umumnya beroperasi melalui strategi-strategi linguistik tertentu, antara lain: strategi referensial atau nominasi untuk melabeli aktor sosial, prediksi untuk menyematkan sifat evaluatif tertentu, argumentasi melalui topoi untuk menjustifikasi klaim, perspektivasi untuk membingkai sudut pandang, serta intensifikasi atau mitigasi untuk memperkuat atau memperhalus daya ilokusi ujaran. Berpijak pada kerangka pemikiran tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis pidato Presiden Prabowo Subianto menggunakan teori Analisis Wacana Kritis dari Ruth Wodak. Analisis ini ditujukan untuk membongkar

makna laten dan strategi kebahasaan yang beroperasi di balik ujaran sang presiden dalam mengonstruksi dikotomi antara elit dan rakyat di tengah tantangan ekonomi global.

Untuk membedah bagaimana relasi kekuasaan, ideologi, dan identitas ini direpresentasikan, Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis/CDA) menawarkan kerangka metodologis yang tepat. CDA secara fundamental berfokus pada analisis teks—baik lisan maupun tulisan—untuk menyelidiki secara kritis ketidaksetaraan sosial, diskriminasi, dan kontrol sebagaimana ia dimanifestasikan melalui penggunaan bahasa (Wodak, 2001). Secara spesifik, Pendekatan Wacana-Historis (Discourse-Historical Approach/DHA) yang dikembangkan oleh Ruth Wodak sangat relevan digunakan dalam konteks ini, mengingat pendekatan ini menaruh perhatian besar pada wacana politik yang melibatkan strategi representasi diri secara positif (*positive self-presentation*) dan representasi “liyan” secara negatif (*negative other-presentation*) untuk membedakan antara kelompok “Kita” (*in-groups*) dan “Mereka” (*out-groups*). Dibandingkan model CDA lain seperti Fairclough yang menekankan tiga dimensi praktik wacana (teks, praktik diskursif, dan praktik sosial) atau Theo van Leeuwen yang berfokus pada skema representasi aktor sosial, DHA menawarkan keunggulan analitis berupa integrasi eksplisit konteks historis, institusional, dan geopolitik melalui perangkat lima strategi diskursif serta kritik tiga dimensi yang sesuai untuk menelusuri bagaimana krisis makroekonomi 2026 direartikulasi dalam pidato kepresidenan (Wodak, 2001; Wodak & Meyer, 2016; Hasmianti et al., 2025). Berpijak pada kerangka pemikiran tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis pidato Presiden Prabowo Subianto menggunakan teori Analisis Wacana Kritis dari Ruth Wodak. Analisis ini ditujukan untuk membongkar makna laten dan strategi kebahasaan yang beroperasi di balik ujaran sang presiden dalam mengonstruksi dikotomi antara elit dan rakyat di tengah tantangan ekonomi global, sekaligus menunjukkan bagaimana interaksi antara krisis nilai tukar rupiah dan wacana populis pemerintah hanya dapat dipetakan secara komprehensif melalui lensa DHA yang sensitif terhadap konteks historis dan relasi kuasa kontemporer (Latifah et al., 2025; Panagaki, Archakis, & Tsakona, 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang berlandaskan pada paradigma kritis. Pendekatan kualitatif deskriptif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena secara objektif dan sistematis dengan memanfaatkan ketersediaan data dari berbagai sumber yang relevan (Rahmani et al., 2026). Berbeda dengan analisis kebahasaan tradisional yang bersifat struktural murni, paradigma kritis dipilih karena penelitian ini diarahkan untuk membongkar realitas semu, relasi kuasa, dominasi, dan manifestasi ideologi yang tersembunyi di balik produksi suatu teks politik (Collins & Stockton, 2018; Fauzan, 2016; Haryono, 2020). Secara spesifik, kerangka metodologis yang diaplikasikan adalah Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis/CDA) melalui model Discourse-Historical Approach (DHA) yang diinisiasi oleh Ruth Wodak. Model DHA memandang wacana sebagai praktik sosial yang diikat secara esensial oleh konteks historisnya, sehingga sangat relevan digunakan untuk menelanjangi strategi linguistik yang kerap mereproduksi hegemoni penguasa terhadap masyarakat (Latifah, Mahirsah, Pranata, & Syukri, 2025).

Objek material yang dianalisis sebagai data primer dalam studi ini adalah wacana politik yang diproduksi oleh institusi kepresidenan, yakni dokumen transkrip verbatim pidato Presiden Prabowo Subianto pada acara peresmian Museum Marsinah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, tanggal 16 Mei 2026 (Berita Satu, 2026). Kajian terhadap pidato kenegaraan merupakan salah satu medium paling krusial dalam analisis wacana, mengingat teks dari aparaturnya beroperasi sebagai instrumen untuk menormalisasi tindakan politik dan menavigasi persepsi publik (Susanto, 2021; Wibowo, 2019). Guna membangun analisis yang komprehensif dan memenuhi asas triangulasi historis dan sosiologis, peneliti turut mengumpulkan data sekunder melalui studi pustaka dan dokumentasi daring. Data sekunder tersebut mencakup laporan jurnalistik, opini publik melalui sinar atau media sosial, serta rujukan akademis yang menyoroti gejala ekonomi makro—khususnya eskalasi geopolitik yang berimbas pada depresiasi ekstrem nilai tukar Rupiah (Dewi, Utami, & Mustofa, 2021; Candelia et al., 2025; Pramesthi, Hutajulu, Putri, & Kartiasih, 2024). Seluruh himpunan data dikumpulkan melalui penerapan teknik dokumentasi dan teknik simak-catat (*listening and note-taking*) yang difokuskan pada observasi mendalam atas struktur kalimat dan kategorisasi unit-unit wacana (Hakim, Azzahro, Hidayat, & Ardhinda, 2024).

Data sekunder melalui studi pustaka dan dokumentasi daring turut dikumpulkan. Data sekunder tersebut mencakup (1) laporan jurnalistik mengenai krisis pelemahan rupiah dan eskalasi geopolitik yang dipublikasikan antara 1 April hingga 31 Mei 2026, (2) pemberitaan dan opini publik terkait peresmian Museum Marsinah serta pidato Presiden Prabowo Subianto yang memuat pernyataan “orang desa tidak pakai dolar”, dan (3) rujukan akademik tentang mekanisme pelemahan rupiah dan dampaknya terhadap sektor riil. Klaster kedua difokuskan pada berita dan analisis yang terbit dalam rentang 16–31 Mei 2026, termasuk liputan Detik.com dan TribunJatim yang merekam secara verbatim ucapan “Mau dolar berapa

ribu pun, kan di desa-desa tidak pakai dolar” serta “Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok”, klarifikasi resmi dari Menteri Keuangan dan juru bicara Gerindra mengenai tujuan ucapan tersebut sebagai upaya menenangkan publik, serta kritik ekonom dan analisis opini di Tempo dan Kompasiana yang menilai pernyataan tersebut sebagai simplifikasi berbahaya di tengah kurs rupiah yang menyentuh Rp 17.600 per dolar AS. Rentang waktu pengambilan data ini dipilih secara sengaja untuk menangkap dinamika wacana di sekitar hari peresmian Museum Marsinah (16 Mei 2026) dan resonansi publik segera setelah pernyataan “orang desa tidak pakai dolar” menjadi sorotan nasional.

Prosedur analisis data dieksekusi secara abduktif dan sirkuler melalui tiga tahapan utama yang saling beririsan. Tahap pertama difokuskan pada analisis konteks empat level (triangulasi) untuk mencegah asumsi tunggal dan bias interpretasi, di mana wacana diletakkan dalam jejaring ko-teks internal, intertekstualitas, bingkai institusional, hingga konteks sosiopolitik makro secara keseluruhan (Hasmiati, Syamsudduha, & Azis, 2025; Panagaki, Archakis, & Tsakona, 2024). Tahap kedua merupakan proses dekonstruksi teks menggunakan lima instrumen strategi diskursif Wodak. Pada proses ini, unit-unit kebahasaan dibedah guna mengidentifikasi strategi nominasi (penamaan atau kategorisasi aktor), prediksi (pelabelan atau atribut), argumentasi melalui topoi (skema penarikan konklusi), perspektivisasi, serta strategi intensifikasi dan mitigasi yang difungsikan untuk memodifikasi derajat ketegasan makna di tengah krisis (Mudiawati, Hudiyono, & Suhatmady, 2023; Naufal, Nurhadi, & Anshori, 2021). Pada tahap pamungkas, temuan tekstual tersebut dievaluasi menggunakan pisau kritik tiga dimensi—meliputi kritik imanen, kritik sosio-diagnostik, dan kritik prospektif—untuk mendemistifikasi kontradiksi struktural serta karakter manipulatif dari praktik diskursif yang dikerahkan oleh penguasa (Juliantari, 2017; Mujianto, Hendrawan, & H. S., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pidato Presiden Prabowo Subianto pada peresmian Museum Marsinah di Nganjuk merupakan sebuah peristiwa diskursif (discursive event) yang sangat kompleks dan sarat akan muatan politis. Pidato ini direproduksi dan dikomunikasikan ke ruang publik di tengah akumulasi krisis makroekonomi, yang utamanya ditandai oleh fenomena pelemahan nilai tukar rupiah secara ekstrem hingga menembus angka Rp17.600 per dolar AS akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah. Melalui kerangka DHA, bagian pembahasan ini akan secara ekstensif membedah keironisan, kontradiksi internal, dan strategi manipulasi wacana sang presiden dalam mengelola gejolak publik kelas pekerja di tengah krisis.

Kritik Imanen: Paradoks Oposisi Biner Melalui Strategi Nominasi dan Prediksi

Model konteks empat level dalam DHA mewajibkan pembacaan teks melalui lensa triangulasi historis dan sosiologis (Panagaki, Archakis, & Tsakona, 2024). Teks pidato Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Nganjuk tidak lahir dari ruang hampa; isinya berasal dari dikonstruksi di tengah ancaman krisis makroekonomi. Berikut hasil analisisnya:

Table 1. Kritik Imanen: Paradoks Oposisi Biner

Kelompok Aktor	Strategi Nominasi (Penamaan)	Strategi Prediksi (Pemberian Atribut)
<i>In-groups</i> (Pemerintah/ Prabowo)	“Kita”, Pemerintah.	Berani melakukan <i>affirmative action</i> , membela rakyat paling miskin, pelindung.
<i>In-groups</i> (Rakyat Bawah)	“Kaum buruh”, “petani”, “nelayan”, “orang miskin”.	Setia kepada NKRI, anak bangsa yang lemah dan butuh dibela.
<i>Out-groups</i> (Elit/Eksternal)	“Unsur pimpinan”, “kapitalis tertentu”, “aparatus backing judi/narkoba”, “pengusaha berpemikiran jahat”	Hipokrit (teriak NKRI tapi tidak berpihak pada bangsa), pemikiran jahat, menindas.

Dalam DHA, instrumen utama dari wacana politik yang mempolarisasi adalah penciptaan oposisi biner secara diskursif antara representasi “Kita” (*in-groups*) yang positif dan “Mereka” (*out-groups*) yang dikonstruksi secara negatif (Wodak, 2001). Presiden Prabowo menggunakan strategi referensial (nominasi) secara mencolok untuk membangun citra heroik bagi dirinya sembari mengkambinghitamkan aktor lain. Melalui strategi ini, Prabowo melabeli sasaran audiensnya melalui penamaan seperti “kaum buruh”, “orang-orang miskin”, dan “petani”.

Melalui strategi prediksi, ia menyematkan atribut dan sifat positif pada kelompok bawah tersebut dan pada pemerintahan yang dipimpinnya, seolah pemerintahannya hadir sebagai pelindung tunggal yang melawan dominasi pasar bebas (Latifah et al., 2025; Wodak, 2001). Sebaliknya, untuk merepresentasikan pihak lain secara negatif (*negative other-presentation*), Prabowo menggunakan strategi nominasi dengan melabeli lawan asimetrisnya sebagai “pengusaha berpemikiran jahat”, “kapitalis-kapitalis tertentu”, hingga “unsur pimpinan” yang secara hipokrit berteriak setia kepada NKRI namun tidak berpihak pada rakyat. Berdasarkan kritik imanen (*text or discourse immanent critique*), terdapat kontradiksi diri (*self-contradiction*) yang fatal dalam struktur wacana ini (Wodak, 2001; Susetyo & Dzarna, 2024). Presiden Prabowo mendikotomikan dirinya dengan “unsur pimpinan” dan “aparatus”, yang seakan-olah memosisikan dirinya berada di luar lingkaran struktur kekuasaan. Padahal secara ontologis, ia adalah Presiden sekaligus pemegang hierarki absolut dari kepemimpinan tersebut. Retorika populis ini mengindikasikan bahwa sang presiden sedang mempraktikkan strategi delegitimasi tanggung jawab (*blame avoidance*)—menghindari tanggung jawab makroekonomi dengan mengalihkan kesalahan sistemik kepada pihak atau elit lain di bawahnya. Hal ini dilakukan dengan mengkambinghitamkan aparatur di bawahnya agar institusi kepresidenan terbebas dari tuntutan pertanggungjawaban struktural (Savich, 2021; Susanto, 2021)

Strategi Argumentasi: Konstruksi Topoi untuk Merasionalisasi Hegemoni Kekuasaan

Argumentasi wacana politik diwujudkan melalui skema topoi atau aturan kesimpulan (*conclusion rules*) yang menghubungkan argumen dengan klaim pembenarannya (Wodak, 2001). Pidato Prabowo mengeksploitasi sejumlah topoi strategis untuk menormalisasi agenda politiknya dan melegitimasi dominasinya atas kelas pekerja. Topos Sejarah (*Topos of History*): Topos ini didasarkan pada logika bahwa karena sejarah mengajarkan konsekuensi tertentu, maka sebuah tindakan harus dilakukan dengan membandingkannya pada masa lalu (Wodak, 2001). Pidato Prabowo mengeksploitasi sejumlah topoi strategis untuk menormalisasi agenda politiknya dan melegitimasi dominasinya atas kelas pekerja.

Table 2. Konstruksi Topoi untuk Merasionalisasi Kekuasaan

Jenis Topos	Premis Logika (<i>Conclusion Rule</i>)	Penerapan dalam Teks Pidato	Fungsi Hegemonik
Topos of History (Sejarah)	Sejarah masa lalu adalah pembenaran untuk tindakan saat ini.	Menyebut nama “Bung Karno”, “Bung Hatta”, “Pancasila” serta figur “Marsinah”.	Menyusupkan ideologi rezim saat ini seolah selaras dengan perjuangan pahlawan bangsa.
Topos of Threat (Ancaman)	Krisis eksternal mewajibkan rakyat bersatu dan memaklumi kondisi sulit.	“Banyak negara panik... Perang di Timur Tengah, Selat Hormus ditutup... Berarti pupuk terpengaruh”.	Menggeser kesalahan (<i>blame avoidance</i>) dari kegagalan domestik ke “musuh bersama” global.
Topos of Benevolence (Bantuan)	Otoritas yang dermawan membuktikan negara dalam kondisi kuat.	“Australi minta tolong kita jual (pupuk)... Filipina juga minta... India... Bangladesh...”.	Menciptakan ilusi kebanggaan dan kekuatan di tengah kerentanan ekonomi sektor riil.

Topos Sejarah (*Topos of History*): Topos ini didasarkan pada logika bahwa karena sejarah mengajarkan konsekuensi tertentu, maka sebuah tindakan harus dilakukan dengan membandingkannya pada masa lalu (Wodak, 2001). Prabowo mengeksploitasi nama “Bung Karno”, “Bung Hatta”, dan “Pancasila” untuk menciptakan identitas historis yang seolah-olah linear antara dirinya dengan para pendiri bangsa, sekaligus menggunakan panggung sejarah pahlawan buruh Marsinah untuk mengambil hati gerakan kelas pekerja. Eksploitasi sejarah ini ditujukan untuk menyusupkan ideologi rezim saat ini agar terlihat selaras dengan perjuangan moral para *founding fathers* (Permana, Trikusumaningtias, & Adinugroho, 2024).

Topos Ancaman (*Topos of Threat*): Skema ini membuat dalih bahwa jika terdapat ancaman tertentu, maka perlawanan atau perlindungan mutlak diperlukan (Wodak, 2001). Prabowo menggunakan topos ancaman dengan merujuk pada geopolitik eksternal, dengan menyatakan bahwa “banyak negara panik karena perang di Timur Tengah” yang menyebabkan inflasi pupuk dan krisis ekonomi. Topos ancaman global ini difungsikan untuk merasionalisasi kegagalan ekonomi domestik, dengan menggeser narasi krisis seolah itu murni tekanan dari dunia internasional, bukan imbas dari kebijakan moneter dalam negerinya (Rahmani et al., 2026). Yang akhirnya memaksa masyarakat untuk memaklumi kegagalan pemerintah melalui narasi “musuh bersama” (Candelia et al., 2025; Wibowo, 2019)

Keironisan Internal dalam Strategi Mitigasi: Demistifikasi Diskursus “Dolar dan Rakyat Desa”

Kritik paling krusial dalam DHA Wodak adalah membongkar tabir di balik bahasa terselubung dan strategi mitigasi, yakni strategi linguistik yang digunakan penutur untuk memodifikasi kekuatan epistemik suatu proposisi guna mereduksi gawatnya sebuah krisis (Rahmani et al., 2026; Wodak, 2001).

Table 3. Keironisan Fatal dalam Strategi Mitigasi

Strategi Kebahasaan	Pernyataan Eksplisit dalam Pidato	Fakta Makroekonomi (Socio-Diagnostic)	Kesimpulan Analisis Wacana
Mitigasi Ekstrem (Memperhalus/mengerdilkan daya ledak krisis).	“Rupiah begini, dolar begini. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok. Iya kan? Pangan aman, energi aman.”	Kebutuhan dasar rakyat miskin amat bergantung pada impor berdenominasi dolar (Gandum/Indomie 100% impor, kedelai tempe impor, bahan bakar/energi impor).	Pernyataan tersebut adalah bentuk disinformasi diskursif yang secara ironis mengaburkan realitas material ekonomi sektor riil melalui simplifikasi diskursif rakyat miskin yang sebelumnya dijanjikan akan dilindungi.

Di tengah kecemasan nasional atas terpuruknya nilai tukar rupiah, Prabowo memitigasi krisis tersebut melalui pernyataan kontroversial: “Rupiah begini, dolar begini. Orang rakyat di desa enggak pakai dolar kok... Pangan aman, energi aman.”. Strategi mitigasi dalam pemberitaan ekonomi semacam ini merupakan instrumen yang tidak netral; hal ini secara sadar didesain untuk meminimalisasi kepanikan dan mengelola persepsi risiko di ruang publik (Rahmani et al., 2026). Namun, melalui kritik sosio-diagnostik (*socio-diagnostic critique*), pernyataan ini adalah bentuk simplifikasi yang melahirkan kesesatan rasional (Wodak, 2001).

Mitigasi bahwa masyarakat desa “tidak menggunakan dolar” adalah pembingkaian semantis yang cacat dan cenderung mengabaikan esensi dampak krisis di sektor riil (Rahmani et al., 2026). Secara makroekonomi, lapisan masyarakat bawah dan pedesaan adalah yang paling menderita akibat depresiasi rupiah karena rantai pemenuhan kebutuhan vital mereka—mulai dari kedelai untuk lauk-pauk, gandum, BBM, hingga bahan baku pupuk untuk pertanian—berstatus sebagai komoditas impor yang pembayarannya terikat dengan kurs dolar AS. Ini menciptakan sebuah ironi diskursif: sang Presiden yang di satu sisi bersumpah membela masyarakat marginal, di sisi lain secara sengaja melakukan penyesatan wacana (*discursive misrepresentation*) yang memvalidasi kebutaan struktural terhadap penderitaan ekonomi rakyatnya sendiri (Hasmianti et al., 2025; Rahmani et al., 2026).

Dimensi sosio-diagnostik dari ucapan “orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok” menjadi semakin jelas ketika dihubungkan dengan respons kalangan ekonom dan media arus utama. Sejumlah ekonom yang diwawancarai oleh media menegaskan bahwa pelemahan rupiah hingga menyentuh level sekitar Rp17.600 per dolar AS memiliki dampak langsung terhadap masyarakat desa melalui kenaikan harga barang impor, mulai dari pangan, energi hingga pupuk, sehingga klaim bahwa desa tidak memakai dolar dinilai keliru dan menyesatkan logika ekonomi (Detik.com, 17 Mei 2026; CNBC Indonesia, 15 Mei 2026). Laporan Detik.com menekankan bahwa kebutuhan harian masyarakat pedesaan sangat terkait dengan komoditas impor dan bahwa inflasi pedesaan akan meningkat seiring melemahnya rupiah (Detik.com, 17 Mei 2026), sementara analisis Suara.com menunjukkan bahwa pernyataan Presiden berpotensi menjadi sentimen negatif yang mengganggu kepercayaan pasar dan melemahkan efektivitas kebijakan Bank Indonesia (Suara.com, 16 Mei 2026).

Di ranah wacana opini, Tempo.co secara tegas mengkritik bahwa pidato yang dimaksudkan untuk menciptakan ketenangan publik tidak boleh dibangun di atas penyederhanaan masalah yang mengabaikan fakta keterikatan harga komoditas domestik pada dolar Amerika Serikat (Tempo.co, 17 Mei 2026). Tulisan Sofianofitasari di Kompasiana menggambarkan klaim “rakyat desa tak pakai dolar” sebagai bentuk optimisme yang berpotensi menutup mata terhadap beban struktural yang ditanggung kelas bawah ketika rupiah jatuh ke titik terlemah sepanjang sejarah (Kompasiana, 23 Mei 2026). Laporan TribunJatim bahkan menampilkan kritik langsung dari ekonom Ferry Latuhihin yang menyatakan bahwa “semua warga terdampak jika dolar naik” dan bahwa logika pemerintah yang memisahkan nasib desa dari fluktuasi nilai

tukar adalah logika yang tidak tepat (TribunJatim, 15 Mei 2026). Dalam perspektif Discourse-Historical Approach, rangkaian resistensi diskursif ini memperkuat kritik sosio-diagnostik bahwa strategi mitigasi Presiden bukan sekadar pilihan gaya bahasa, melainkan praktik representasi yang menormalisasi krisis dengan mengaburkan keterhubungan struktural antara desa, impor, dan dolar.

Dengan demikian, ucapan “orang desa tidak pakai dolar” dan penjelasan resmi bahwa pernyataan tersebut sekadar “untuk menghibur rakyat” bukan saja menunjukkan strategi mitigasi, tetapi juga memperlihatkan bagaimana institusi pemerintah dan partai berupaya membingkai krisis sebagai sesuatu yang dapat dijinakkan melalui retorika sederhana, meskipun secara empiris dampak pelemahan rupiah tetap menjalar sampai ke lapisan masyarakat desa.

Fakta makroekonomi secara objektif menunjukkan bahwa masyarakat desa justru merupakan entitas yang paling rentan terhadap guncangan dolar, mengingat komoditas dasar mereka (gandum, kedelai, pupuk, hingga bahan bakar minyak) amat bergantung pada instrumen impor berdenominasi dolar AS (Dewi et al., 2021; Rahmani et al., 2026). Melalui klaim bahwa rakyat desa terisolasi dari fluktuasi dolar, presiden sedang mempraktikkan disinformasi diskursif yang tak sejalan dengan rasionalitas publik. Keironisan ini sangat tajam: pemimpin yang mengklaim diri sebagai pembela kaum miskin justru menciptakan efek kabur struktural terhadap penderitaan ekonomi rakyatnya sendiri melalui permainan kata (Anam, Yumna, & Miftahulhairah, 2023; Hasmianti et al., 2025).

KESIMPULAN

Aplikasi teori *Discourse-Historical Approach* (DHA) membuktikan secara nyata bahwa teks pidato politik tidak diproduksi sekadar sebagai laporan kondisi negara, melainkan beroperasi sebagai instrumen strategis untuk menjamin keberlangsungan stabilitas otoritas di tengah krisis makroekonomi. Bagi perkembangan ilmu sosial dan humaniora, temuan ini memiliki makna yang sangat signifikan karena berhasil menyingkap paradoks diskursif dalam struktur wacana kekuasaan. Fenomena ini menunjukkan bagaimana seorang pemimpin dapat mendikotomikan dirinya agar tampil sebagai pelindung anti-elit, namun pada saat yang sama memanipulasi pemahaman kelas pekerja melalui strategi mitigasi yang memutarbalikkan logika ekonomi empiris. Lebih jauh, kajian ini memperkaya pemahaman sosiologis dan linguistik bahwa manifestasi kebahasaan dalam politik secara aktif dirancang untuk mengeksklusi tanggung jawab struktural. Wacana pemerintah tersebut digunakan untuk mendistraksi publik dengan retorika kultural, serta melanggengkan penundukan kelas marginal demi menjaga hegemoni dan relasi kekuasaan secara absolut.

Sebagai wujud kritik prospektif (*prognostic critique*) dalam model Wodak yang berorientasi transformatif untuk memperbaiki praktik komunikasi, terdapat sejumlah rekomendasi konkret dalam mengonstruksi komunikasi publik di masa krisis. Pertama, harus mengedepankan transparansi fakta makroekonomi dengan tidak membangun ketenangan publik di atas simplifikasi yang mengabaikan realitas struktural di lapangan. Otoritas tidak boleh mempraktikkan disinformasi diskursif yang merendahkan rasionalitas masyarakat. Kedua, harus menghentikan penciptaan wacana oposisi biner yang mempolarisasi masyarakat serta menghindari praktik strategi delegitimasi tanggung jawab (*blame avoidance*) yang secara tidak bertanggung jawab mengalihkan kegagalan sistemik kepada pihak luar maupun aparaturnya di tingkat bawah. Terakhir, perlu berhenti mengeksploitasi retorika ancaman eksternal (*topos of threat*) yang memaksa masyarakat memaklumi kegagalan domestik melalui narasi “musuh bersama”, dan beralih pada komunikasi publik yang dibangun dengan sikap empatik yang tulus terhadap penderitaan riil kelas pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Y., Yumna, Y., & Miftahulhairah, M. (2023). Relasi kuasa dalam penamaan wilayah (toponimi) di Kota Bekasi: Analisis wacana kritis. *Jurnal Bahasa dan Sastra*, 11(2), 145–160.
- BeritaSatu. (2026). [FULL] Pidato Lengkap Prabowo di Peresmian Museum Marsinah di Nganjuk [Video]. YouTube.
- Collins, C. S., & Stockton, C. M. (2018). The central role of theory in qualitative research. *International Journal of Qualitative Methods*, 17(1), 1–10.
- Dewi, D. N. A. M., Utami, L. S., & Mustofa, R. D. A. (2021). Pengaruh Harga Minyak Dunia, Suku Bunga, Inflasi, IHSG, Dan Neraca Perdagangan Terhadap Nilai Tukar. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(3), 223–232. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i3.346>
- Detik.com. (2026, 17 Mei). Prabowo sebut ‘orang desa tak pakai dolar’, Purbaya: untuk hiburan rakyat aja. Detik.com.
- Detik.com. (2026, 17 Mei). Gerindra jelaskan maksud Prabowo bilang ‘orang desa tidak pakai dolar’. Detik.com.

- Fauzan, U. (2016). Analisis wacana kritis: Mengungkap ideologi dalam wacana. Idea Press.
- Hakim, L., Azzahro, A. F., Hidayat, M., & Ardhinda, S. D. (2024). Critical discourse analysis in the reporting of the NTT Governor's school entry hours policy controversy. *Kalijaga Journal of Communication*, 6(1), 59–80. <https://doi.org/10.14421/kjc.61.04.2024>
- Harmoko, D., & Purwaningrum, P. (2025). Simbolisme politik dan narasi keberlanjutan: Studi analisis wacana kritis pidato Presiden RI ke-7 Joko Widodo. *JURNALISTRENDI: Jurnal Linguistik, Sastra, dan Pendidikan*, 10(1), 54–66. <https://doi.org/10.51673/jurnalistrendi.v10i1.2415>
- Haryono, C. G. (2020). Analisis teks: Ragam metode dan implementasinya dalam penelitian komunikasi. Goresan Pena Publishing.
- Hasmiati, H., Syamsudduha, S., & Azis, A. (2025). Social, Political, and Cultural Discourse in the Movie Gadis Kretek: A Critical Discourse Analysis by Ruth Wodak. *Journal of Asian Multicultural Research for Social Sciences Study*, 6(2), 29–43. <https://doi.org/10.47616/jamrsss.v6i2.606>
- Juliantari, N. K. (2017). Paradigma analisis wacana dalam memahami teks dan konteks untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman. *ACARYA PUSTAKA: Jurnal Ilmiah Perpustakaan dan Informasi*, 3(1), 12–25. <https://doi.org/10.23887/ap.v3i1.12732>
- Candelina, dera, & Nurdin, A. (2025). Construction of Party Political Narratives in the 2024 DKI Jakarta Regional Head Election (Pilkada) Framing Analysis on CNNIndonesia.com and Okezone.com: Konstruksi Narasi Politik Partai dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024 Analisis Framing pada CNNIndonesia.com Dan Okezone.com. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 9(5), 1771–1785. <https://doi.org/10.36526/santhet.v9i5.5474>
- Kompas.com. (2026, 17 Mei). Orang desa tidak pakai dolar dan retorika populis Prabowo. Kompas.com.
- Latifah, R. N., Mahirsah, M. K., Pranata, D. A. P., & Syukri, H. (2025). Representasi Kekuasaan dalam Teks Supersemar: Kajian Analisis Wacana Kritis Ruth Wodak. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 3041–3050. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4004>
- Mudiawati, R. C., Hudiyo, Y., & Suhatmady, B. (2023). Analisis wacana kritis Norman Fairclough terhadap bahasa slogan aksi demonstrasi guru di Samarinda. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 6(3), 739–762. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v6i3.694>
- Mujianto, H., Hendrawan, H., & H. S. (2023). Analisis wacana kritis pemberitaan kasus penipuan di media online Kompas.com. *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran Dan Penelitian*, 10(1), 1016–1030. <https://doi.org/10.52434/jk.v9i1.2464>
- Naufal, D. I., Nurhadi, J., & Anshori, D. (2021). KADRUN, KPK, DAN BUZZER DI LINGKUNGAN TEMPO: ANALISIS WACANA KRITIS RUTH WODAK. *Jurnal Pena Indonesia*, 7(1), 1–18. Retrieved from <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpi/article/view/13370>
- Panagaki, N., Archakis, A., & Tsakona, V. (2024). Representing the 'other' in digital spaces: A discourse-historical approach to social media comments. *Critical Discourse Studies*, 21(3), 302–320.
- Permana, R., Trikusumaningti, I., & Adinugroho, P. (2024). Freedom of Speech di Ruang Virtual: Analisis Wacana Fairclough Pada Kanal Youtube Rocky Gerung Official. *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 5(3), 3199–3210. <https://doi.org/10.35870/jimik.v5i3.926>
- Pramesthi, A. A., Hutajulu, D. L., Putri, N. Z., & Kartiasih, F. (2024). Analisis pengaruh harga minyak mentah dan nilai tukar terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(1), 257–269.
- Purwaningrum, P. W., & Harmoko, D. D. (2025). A critical discourse analysis of presidents' inaugural speeches in Indonesia: A Fairclough perspective. *Wanastra: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 17(2), 117–129. <https://doi.org/10.31294/wanastra.v17i2.11954>
- Rahmani, N., Cahya, A., Sianturi, S. F., Rusdi, T. A., Damanik, W. D., Nazwa, Z., & Khairani, I. (2026). Konstruksi krisis dan interdiskursivitas geopolitik: Analisis Discourse-Historical Approach (DHA) terhadap narasi pelemahan rupiah Rp 17.000. *KOPULA: Jurnal Bahasa, Sastra dan Pendidikan*, 8(2), 292–304.
- Savich, E. (2021). Imagery as discourse: Analyzing visual representations of national identity through the DHA lens. *Respectus Philologicus*, 39(44), 112–128.
- Susanto, A. (2021). Retorika politik dalam pemilihan presiden: Kajian analisis wacana kritis. *Wacana: Jurnal Bahasa, Seni, dan Pengajaran*, 15(2), 101–115.
- Susetyo, A. M., & Dzarna, D. (2024). Ideologi dan Kekuasaan Berita Pelarangan Transaksi di Tiktok Shop: Analisis Wacana Kritis Theo Van Leeuwen. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra*, 10(4), 3679–3692.
- Sofianofitasari, S. (2026, 23 Mei). Pernyataan Prabowo soal rupiah dan “rakyat desa tak pakai dolar”: simplifikasi berbahaya atau optimisme berlebihan? Kompasiana.com.
- Tempo.co. (2026, 17 Mei). Benarkah pernyataan Prabowo soal rakyat desa tak pakai dolar? Tempo.co.

- TribunJatim. (2026, 16 Mei). JADI SOROTAN PUBLIK! Prabowo dikritik sesuai sebut “orang desa tak pakai dolar”. Tribun-Video.com.
- Utomo, P., Asvio, N., & Prayogi, F. (2024). Metode penelitian tindakan kelas (PTK): Panduan praktis untuk guru dan mahasiswa di institusi pendidikan. Pubmedia Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Indonesia, 1(4), 19-19.
- Wibowo, B. (2019). Representasi ideologi dalam teks pidato kenegaraan. Wacana: Jurnal Bahasa, Seni, dan Pengajaran, 13(1), 45–58.
- Wodak, R. (2001). The discourse-historical approach. Dalam R. Wodak & M. Meyer (Eds.), *Methods of Critical Discourse Analysis* (hlm. 63-94). Sage Publications.
- Wodak, R. (2010). *Critical Discourse Analysis: Some important concepts and considerations* [Materi presentasi]. ACCEPT - CDA Course 2010.
- Wodak, R., & Meyer, M. (2016). *Methods of Critical Discourse Studies* (3rd ed.). London: Sage Publications.